

ANALISIS JARINGAN KOORDINASI DALAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA TSUNAMI TAHUN 2018 DI KABUPATEN PANDEGLANG

Nur Ikhsani Rahmatika*¹

Universitas Syiah Kuala, Indonesia
nurrahmatika@usk.ac.id

Sobar Sutisna

Universitas Pertahanan, Indonesia

Arief Budiarto

Universitas Jenderal Ahmad Yani, Indonesia

Abstract

In post-disaster rehabilitation and reconstruction, the participation of all parties is necessary because the rehabilitation and reconstruction program is the most complex activity in disaster management, from the process of planning, financing to implementation. The tsunami that occurred in the Sunda Strait on December 22 2018 brought huge losses and needed to be dealt with quickly. Delays in the rehabilitation and reconstruction process can affect the stability of national security. The participation of all parties in the rehabilitation and reconstruction process is necessary so that the post-disaster recovery process can run effectively and efficiently. The participation of various parties in an activity requires coordination so that the activity can run properly. The purpose of this research is to analyze the coordination network in post-2018 tsunami rehabilitation and reconstruction in Pandeglang Regency. The method used in this study is a qualitative method. The data used are primary data and secondary data. Primary data obtained from interviews with research subjects selected based on purposive sampling and snowball. Data analysis was carried out using qualitative data analysis methods and simulations using UCINET 6 for the coordination network. The results showed that all parties participated in post-tsunami recovery management in Pandeglang District starting from the planning, implementation to monitoring and evaluation stages. The level and form of participation is different for each element of society involved. Coordination is carried out with two coordination networks, namely with the type of lead agency and lead leadership.

Keywords: Disaster Management, Rehabilitation and Reconstruction, Tsunami

Abstrak

Dalam Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana partisipasi semua pihak diperlukan karena program Rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan kegiatan dalam penanggulangan bencana yang paling kompleks dari proses perencanaan, pembiayaan hingga pelaksanaan. Tsunami yang terjadi di Selat Sunda pada 22 Desember 2018 membawa kerugian yang besar dan perlu

¹ Corresponding author.

dilakukan penanggulangan secara cepat. Terhambatnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berpengaruh terhadap stabilitas keamanan nasional. Keikutsertaan semua pihak dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi diperlukan agar proses pemulihan pasca bencana berjalan dengan efektif dan efisien. Keikutsertaan berbagai pihak dalam suatu kegiatan membutuhkan koordinasi agar kegiatan dapat berjalan dengan semestinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis jaringan koordinasi dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Bencana Tsunami Tahun 2018 di Kabupaten Pandeglang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan subjek penelitian yang dipilih berdasarkan purposive sampling dan snowball. Analisa data dilakukan dengan metode analisa data kualitatif dan simulasi menggunakan UCINET 6 untuk jaringan koordinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua pihak berpartisipasi dalam manajemen pemulihan pasca Tsunami di Kabupaten Pandeglang mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi. Tingkat dan bentuk partisipasi berbeda pada setiap elemen masyarakat yang terlibat. Koordinasi dilakukan dengan dua jaringan koordinasi yaitu dengan tipe lead agency dan lead leadership

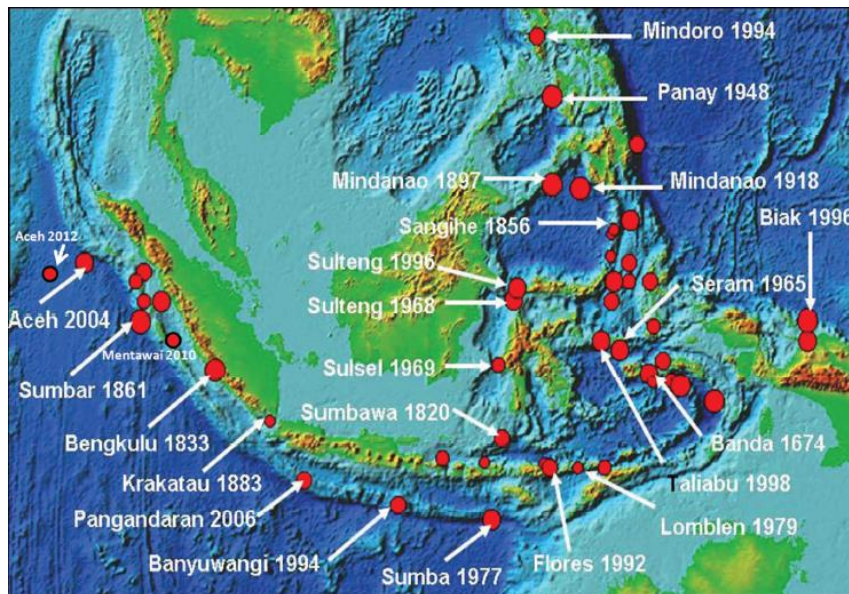
Kata Kunci: Bencana Tsunami, Manajemen Bencana, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

PENDAHULUAN

Ancaman bencana dapat menyebabkan korban jiwa dan kerusakan harta benda (BNPB, 2011). Berdasarkan data dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) jumlah kejadian bencana di Indonesia pada tahun 2018 adalah 2.574 kejadian bencana yang menyebabkan 21.083 orang luka-luka, 10.333.309 orang terdampak dan mengungsi serta 4.814 orang hilang dan meninggal dunia. Salah satu bencana yang banyak menyebabkan kerusakan dan korban jiwa adalah Bencana Tsunami.

Daerah dengan ancaman tsunami yang sangat tinggi dan tinggi tersebar pada hampir seluruh wilayah Indonesia, mulai dari pantai Barat Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, selatan Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi bagian tengah dan utara, Maluku dan Maluku utara serta Papua bagian barat dan utara. Menurut BNPB (2012) Sejarah tsunami di Indonesia menunjukkan bahwa kurang lebih 172 tsunami yang terjadi dalam kurun waktu antara tahun 1600 – 2012. Sumber pembangkitnya diketahui bahwa 90% dari tsunami tersebut disebabkan oleh aktivitas gempabumi tektonik, 9% akibat aktivitas vulkanik dan 1% oleh tanah longsor yang terjadi dalam

tubuh air (danau atau laut) maupun longsor dari darat yang masuk ke dalam tubuh air.



Sumber : BNPB

Gambar 1. Kejadian Gempa dan Tsunami di Indonesia

Pada Tanggal 22 Desember 2018 terjadi tsunami di Selat Sunda yang menimpa Provinsi Banten dan Lampung. menewaskan 437 orang dan menghancurkan kurang lebih 2.752 rumah warga. Propinsi Banten sendiri, wilayah yang paling parah terkena dampak tsunami adalah Kabupaten Pandeglang. Di wilayah ini, tsunami menewaskan 296 orang, 105 di antaranya warga Pandeglang di Kecamatan Carita, Labuan, Panimbang, dan Sumur. Adapun jumlah pengungsi mencapai 20.726 orang (BNPB, 2018).

Kejadian Gempa berpotensi Tsunami juga kembali terjadi pada tanggal 2 Agustus 2019. Gempa dengan Magnitudo 7.4 yang kemudian dimutakhirkan menjadi 6.9 terjadi dengan pusat Gempa berada di Barat Daya Sumur Banten. Gempa ini mengakibatkan 233 bangunan di Provinsi Banten mengalami kerusakan. Proses pemulihan pasca bencana Tsunami yang terjadi tahun 2018 masih berlangsung dan Banten kembali ditimpa musibah yang menyebabkan kerusakan yang cukup besar terutama kerusakan fisik bangunan perumahan.

Pasca kejadian bencana masyarakat diharapkan kembali pulih dengan cepat agar tidak berdampak pada keamanan nasional. Pemerintah telah merencanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang tertuang dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi. Peran Serta masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana diatur dalam Perka BNPB NO 11 Tahun 2014 dimana peran serta masyarakat merupakan proses keterlibatan masyarakat dalam

terlaksananya penanggulangan bencana yang terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman risiko dan dampak bencana.

Pemulihan berbasis komunitas / masyarakat bisa berupa bantuan finansial atau material yang disalurkan melalui organisasi masyarakat secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan pembuatan dan pengembangan manajemen. Mengacu pada model keterlibatan masyarakat dalam program pascabencana memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai program berbasis komunitas, yaitu, di mana komunitas keterlibatan pada tingkat dalam bentuk kolaborasi atau pemberdayaan.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Dalam metode kualitatif yang dilakukan ini, pengambilan data dan analisa didukung dari hasil penilaian berdasarkan observasi di lokasi penelitian yang selanjutnya akan digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam penelitian ini. Untuk memperkuat hasil penelitian ini, peneliti juga melakukan pengujian keabsahan data dan dilengkapi dengan panduan wawancara yang terdiri dari pokok-pokok pertanyaan yang akan digali dari subyek penelitian. Data yang digunakan untuk melakukan analisis jaringan merupakan data hasil wawancara dan observasi dan wawancara dengan subjek penelitian di lapangan. Subjek penelitian dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling dan snowball. Untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai jaringan koordinasi analisa data dibantu dengan menggunakan analisis berdasarkan komposisi jaringan dan struktur jaringan, serta dapat fokus pada aktor individu dalam jaringan maupun pada jaringan secara keseluruhan (Jones dan Faas, 2017). Analisis ini dilakukan dengan menggunakan Software UCINET 6.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pandeglang selama 8 bulan mulai September 2019 hingga April 2020. Secara geografis Kabupaten Pandeglang terletak antara 6°21'- 7° 10' Lintang Selatan dan 104° 48'- 106° 11' Bujur Timur, memiliki luas wilayah 2.746,81 Km² (274.681 ha), atau sebesar 29,98% dari luas Provinsi Banten dengan panjang pantai mencapai 307 km, Subyek dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten diantaranya adalah :

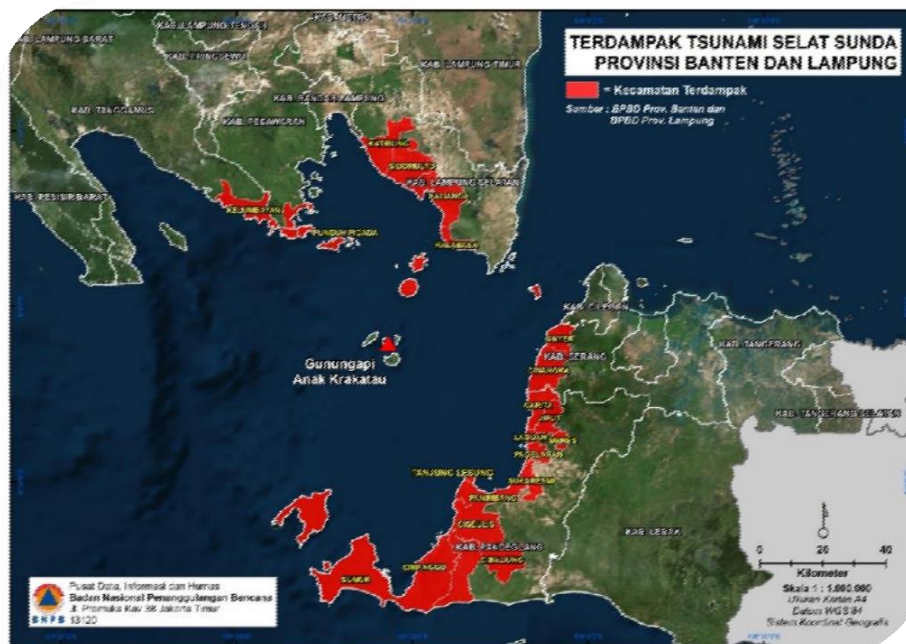
Tabel 1. Subyek Penelitian

No	Unsur	Instansi
1	Pemerintah Pusat	BNPB
2	Pemerintah Provinsi	BPBD Provinsi Banten
3	Pemerintah Kabupaten	1. BPBD Kabupaten Pandeglang 2. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pandeglang 3. Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang 4. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang 5. Bappeda Kabupaten Pandeglang 6. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang 7. Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang 8. Camat
4	TNI	1. Kodim 0601 Pandeglang 2. Koramil 3. Pos Angkatan Laut
5	Pemerintah Desa	Kepala Desa
6	Masyarakat	1. Tokoh masyarakat 2. Tokoh Agama 3. Lembaga Sosial Masyarakat (LSM)
7	Dunia Usaha	Pengusaha Hotel, Grab

Berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia tahun 2013, wilayah Kabupaten Pandeglang mempunyai skor rawan bencana 74 (skala tinggi) terhadap bencana alam berupa erupsi gunung api, gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor kekeringan dan angin puting beliung. Kabupaten Pandeglang memiliki tingkat bahaya Tsunami yang tinggi dikarenakan berada di zona subduksi antara lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Selain itu di Selat Sunda juga terdapat Gunung Anak Krakatau yang pada Tahun 1883 pernah mengalami Erupsi yang menyebabkan Tsunami dimana sebanyak 30.000 orang meninggal dunia.

prasarana dan sarana fasilitas umum dan sosial dengan tingkat kerusakan berat, sedang maupun ringan.

Dengan kondisi tersebut, Bupati Pandeglang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 360/Kep.425-Huk/2018 tanggal 23 Desember 2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Tsunami di Kabupaten Pandeglang Tahun 2018 dan Surat Keputusan Nomor 460/Kep.17-Huk/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Tsunami di Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2019.



Gambar 3. Peta Terdampak Tsunami Selat Sunda Tahun 2018

Kerusakan dan Kerugian akibat Tsunami di Kabupaten Pandeglang

Total kerusakan dan kerugian akibat bencana Tsunami di Kabupaten Pandeglang adalah sebesar Rp. 260.068.971.673,00 atau sebesar dua ratus enam puluh milyar enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh satu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah. Kerusakan dan kerugian tersebut meliputi sektor permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi dan listas sektor.

Tabel 1 Data Total Kerusakan dan Kerugian Akibat Tsunami di Kabupaten Pandeglang

No	Sektor /Subsektor	Nilai		total kerusakan dan kerugian
		Kerusakan	Kerugian	

1	PERMUKIMAN		Rp 27,446,400,000	Rp 29,284,303,000	Rp 56,730,703,000
	1	Perumahan	Rp 24,894,000,000	Rp1,875,403,000	Rp 26,769,403,000
	2	Isi Rumah	Rp 2,552,400,000	Rp -	Rp 2,552,400,000
	3	Pembangunan Huntara	Rp -	Rp15,285,000,000	Rp 15,285,000,000
	4	Jaminan Hidup Pengungsi	Rp -	Rp 12,123,900,000	Rp 12,123,900,000
2	INFRASTRUKTUR		Rp 8,891,847,303	Rp 26,022,785,000	Rp 34,914,632,303
	1	Transportasi Darat	Rp 3,575,000,000	Rp 82,130,000	Rp 3,657,130,000
	2	Transportasi Air	Rp 127,500,000	Rp25,940,655,000	Rp 26,068,155,000
	3	Sumber Daya Air	Rp 4,037,500,000	Rp -	Rp 4,037,500,000
	4	Energi	Rp 1,151,847,303	Rp -	Rp 1,151,847,303
3	SOSIAL		Rp 14,322,652,200	Rp 34,565,000	Rp 14,357,217,200
	1	Pendidikan	Rp 14,045,825,000	Rp 19,847,000	Rp 14,065,672,000
	2	Agama	Rp 276,827,200	Rp 14,718,000	Rp 291,545,200
4	EKONOMI		Rp 42,335,899,130	Rp 110,624,203,000	Rp 152,960,102,130
	1	Perdagangan	Rp 6,937,000,000	Rp 15,444,588,000	Rp 22,381,588,000
	2	Pertanian	Rp 4,284,864,000	Rp 6,089,020,000	Rp 10,373,884,000
	3	Peternakan	Rp 179,647,503	Rp -	Rp 179,647,503

	4	Perikanan	Rp 14,509,037,627	Rp 25,420,995,000	Rp 39,930,032,627
	5	Pariwisata	Rp 16,425,350,000	Rp 63,669,600,000	Rp 80,094,950,000
5	LINTAS SEKTOR		Rp 385,871,040	Rp 720,446,000	Rp 1,106,317,040
	1	Pemerintahan	Rp 44,321,040	Rp 446,000	Rp 44,767,040
	2	Lingkungan Hidup	Rp 341,550,000	Rp 720,000,000	Rp 1,061,550,000
JUMLAH			Rp 93,382,669,673	Rp 166,686,302,000	Rp 260,068,971,673

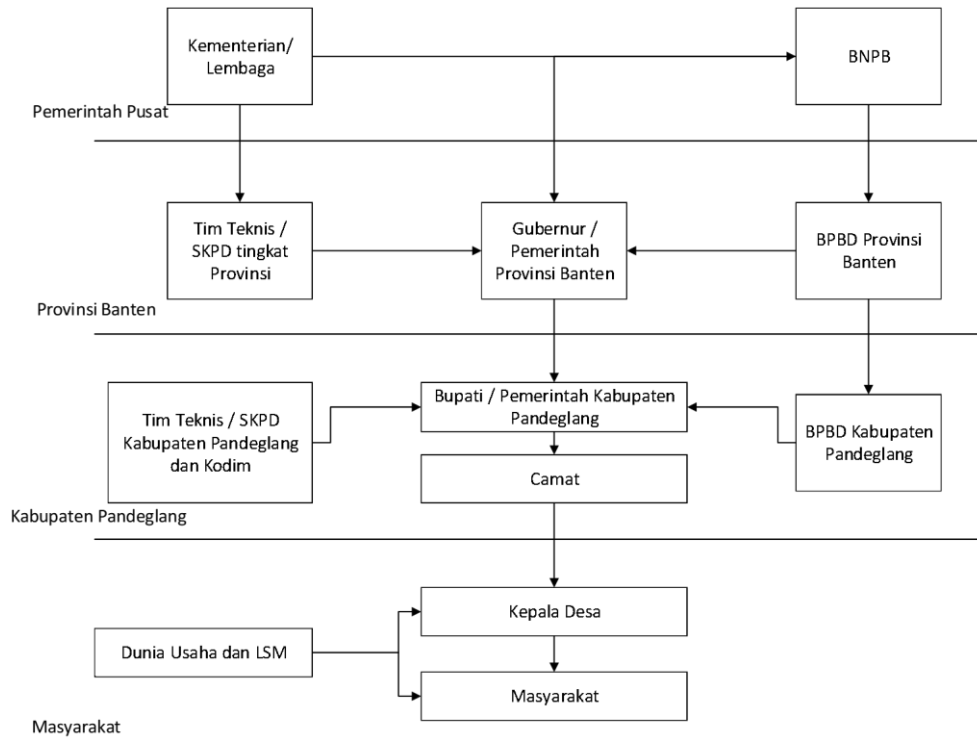
Sumber : BPBD Kabupaten Pandeglang, 2019

Jaringan Koordinasi dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Tsunami di Kabupaten Pandeglang

Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana merupakan kegiatan yang mempunyai ruang lingkup pengkajian kebutuhan pascabencana, penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, pengalokasian sumber daya dan dana, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Pada setiap tahapan dari mulai pengkajian kebutuhan hingga monitoring dan evaluasi melibatkan banyak pihak mulai dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Dalam hal pendanaan untuk kebutuhan pasca bencana tidak hanya berasal dari APBD Kabupaten Pandeglang tetapi juga dari pemerintah pusat, Provinsi Banten, masyarakat dan dunia usaha.

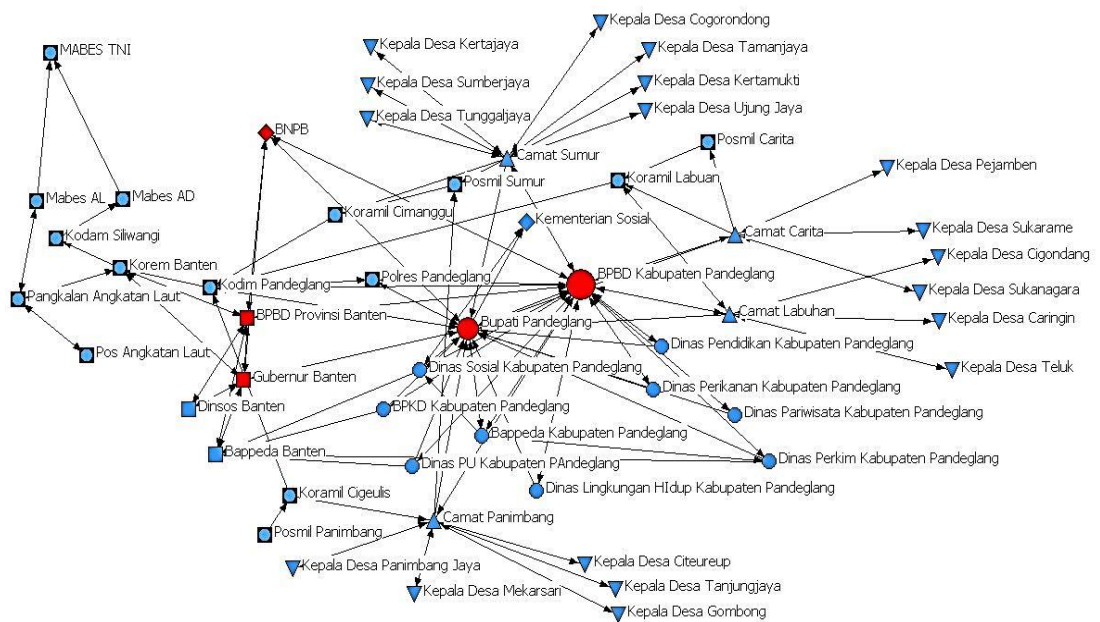
Dalam upaya pemulihan pasca bencana Tsunami diperlukan koordinasi semua pihak agar upaya pemulih berjalan dengan baik. Penanggungjawab penanggulangan bencana adalah pemerintah daerah di bawah koordinasi BPBD Kabupaten Pandeglang namun dalam kondisi daerah tidak mampu untuk melakukan upaya pemulihan sendiri maka dibantu oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Dalam wawancara yang dilakukan kepada subyek penelitian bahwa koordinasi banyak dilakukan sebagai upaya agar pemulihan pasca Tsunami dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Hasil analisa yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan bahwa koordinasi dilakukan baik secara formal maupun non formal. Dalam upaya Pemulihan Pasca Tsunami lembaga yang terkait akan berkoordinasi sesuai dengan strukturnya baik itu di tingkat Pemerintah

Pusat, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Pandeglang hingga ke Masyarakat.



Gambar 4 Jaringan Struktural dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Tsunami

Selain jaringan secara struktural dimana terbagi atas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan masyarakat, terdapat juga jaringan koordinasi yang dianalisis berdasarkan analisis jaringan komunikasi dari hasil wawancara dengan subyek penelitian. Aktor aktor yang melakukan koordinasi disimulasikan dalam jejaring koordinasi yang terbentuk. Perbedaan dengan jaringan struktural adalah dalam jaringan komunikasi dapat diketahui luasnya jaringan yang terbentuk dalam upaya Pemulihan Pasca Tsunami yang tidak terlihat secara garis struktural. Hasil analisis Jaringan menggunakan software UCINET 6 adalah sebagai berikut :



Gambar 5 Hasil Analisis Jaringan Koordinasi

Berdasarkan hasil simulasi oleh UCINET 6 yang dilakukan oleh peneliti bahwa aktor utama dalam koordinasi pemulihan pasca bencana Tsunami di Kabupaten Pandeglang adalah BPBD Kabupaten Pandeglang dan Bupati Pandeglang. Hal ini terkait dengan BPBD sebagai koordinator untuk pemulihan Pasca Bancana Tsunami di Kabupaten Pandeglang yang memiliki banyak informasi dan bertanggung jawab atas segala kegiatan dalam upaya pemulihan pasca bencana dan Bupati Pandeglang sebagai penanggungjawab dalam rehabilitasi dan rekonstruksi.

BPBD Kabupaten Pandeglang merupakan koordinator utama dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Tsunami. Aliran informasi dan data dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemulihan pasca Tsunami dikoordinasikan dengan BPBD. Namun BPBD juga memiliki hambatan dan kendala yang tidak dapat memaksa semua pihak untuk melakukan koordinasi terutama pihak pihak yang berada di luar jaringan struktural seperti NGO dan LSM. Dalam hal jejaring yang terbentuk masih banyak instansi instansi yang belum masuk dalam jaringan koordinasi tersebut. Hal ini dikarenakan masih banyak instansi yang belum melakukan koordinasi seperti LSM LSM yang kegiatannya tidak dapat dilakukan pendataan oleh BPBD karena tidak melakukan koordinasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusdalops BPBD Kabupaten Pandeglang bahwa masih banyak kendala dalam melakukan koordinasi ke semua level sehingga masih banyak LSM yang belum dapat terkoordinasikan dan dari LSM tersebut juga tidak melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan pada hasil wawancara terhadap aktor aktor pelaksana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Tsunami di Kabupaten Pandeglang dan dilakukan simulasi dengan menggunakan software UCINET 6 menunjukkan bahwa

koordinasi dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Tsunami di Kabupaten Pandeglang mencakup jaringan yang luas. Dalam Perka BNPB No 11 Tahun 2008 BAB 3 disebutkan bahwa Koordinasi dalam proses rekonstruksi pasca bencana mencakup koordinasi vertikal antara struktur di tingkat daerah dan tingkat pusat; koordinasi horisontal lintas sektor; koordinasi dalam kerjasama internasional; serta koordinasi dengan organisasi non-pemerintah, termasuk LSM.

Dalam jaringan koordinasi pada rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Tsunami di Kabupaten Pandeglang terdapat dua bentuk jaringan koordinasi yaitu jaringan secara hirarkis atau struktural atau jaringan koordinasi birokrasi dan jaringan koordinasi keseluruhan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Tsunami. Berdasarkan Gilman dalam Bisri (2013) tipe koordinasi pada masalah kemanusiaan ada 4 macam yaitu Loose Alliance, Orchestrated Alliance, Lead Leadership dan Lead Agency. Jaringan birokrasi adalah tipe jaringan Lead Agency. Jaringan pada keseluruhan program rehabilitasi dan rekonstruksi lebih luas daripada jaringan birokrasi. BPBD Kabupaten Pandeglang dan Bupati Pandeglang dalam jaringan koordinasi dalam rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai koordinator utama maka jaringan koordinasi yang terbentuk adalah lead leadership. Pada jaringan koordinasi lead leadership ini terdapat dua atau lebih aktor yang bermitra dan bersama sama membuat keputusan secara operasional dan strategis.

Adanya koordinasi dalam jaringan yang terbentuk pada rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Tsunami di Kabupaten Pandeglang mengurangi adanya tumpang tindih atau duplikasi program dan persaingan. Dengan BPBD sebagai aktor utama yang melakukan koordinasi program program terkait rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan diketahui oleh BPBD Kabupaten Pandeglang. Namun masih ditemukan banyak kendala untuk melakukan koordinasi diantaranya adalah adanya instansi instansi atau komunitas masyarakat di luar pemerintahan seperti NGO dan LSM yang belum melakukan koordinasi yang semestinya sehingga program program yang dilaksanakan tidak terekam dalam pendataan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pandeglang. . Hambatan yang disampaikan oleh BPBD Kabupaten Pandeglang adalah adanya pihak pihak LSM yang tidak melakukan koordinasi dengan pihak BPBD Kabupaten Pandeglang sebagai koordinator utama.

Koordinasi wajib dilakukan dalam manajemen bencana. Hal ini dikarenakan situasi bencana identik dengan pemenuhan kebutuhan, kerusakan infrastruktur dan jaringan komunikasi, persaingan prioritas, mobilisasi bantuan dari berbagai organisasi/instansi (UNDAC, 2013). Boin et al. dalam Lassa (2015) juga menyatakan bahwa koordinasi menjadi hal penting dalam penanggulangan bencana. Koordinasi yang baik dapat mengefisiensikan waktu respon tanggap darurat dan mengaktifkan segala upaya penanggulangan yang dilakukan (Lassa, 2015). Dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Tsunami di Kabupaten Pandeglang koordinasi banyak dilakukan baik secara koordinasi vertikal maupun horizontal. Hasil dari jaringan yang terbentuk berdasarkan simulasi dari UCINET menunjukkan

bahwa banyak aktor terlibat di dalam program pasca Tsunami. Hal ini dimaksudkan agar upaya upaya yang dilakukan menjadi efektif.

Manajemen bencana merupakan kegiatan yang terkoordinasi dari tingkat daerah melalui pemerintah daerah, provinsi hingga ke pemerintah pusat dengan level kegiatan sesuai dengan tingkat keparahan bencana. Pemerintah daerah sebagai titik kritis dalam jaringan kolaborasi penanggulangan bencana namun kemampuan otoritas pemerintah daerah juga terbatas (Douglas, 1999 dan Norman, 2003 dalam Kusumasari, 2014). Penanggulangan bencana melibatkan organisasi organisasi yang berbeda baik dari LSM maupun pemerintah yang memiliki peran, tanggungjawab dan tujuan yang berbeda. Para pelaku dalam penanggulangan bencana ini melakukan tugas yang berbeda pada waktu dan tempat yang berbeda yang memungkinkan terjadinya tumpang tindih atau persaingan satu sama lain sehingga dibutuhkan jaringan koordinasi. Pada rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Tsunami di Kabupaten Pandeglang terdapat banyak instansi dan komunitas yang berpartisipasi. BPBD Kabupaten Pandeglang dan Bupati Pandeglang berperan sebagai koordinator utama.

Berdasarkan jaringan struktural yang terbentuk dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Tsunami di Kabupaten Pandeglang hanya melibatkan aktor aktor yang bertanggungjawab terhadap penanggulangan bencana di Indonesia dalam peraturan perundang undangan. Dalam sistem penanggulangan bencana yang ada di Indonesia yang diatur dalam peraturan perundang undangan hanya merupakan jaringan secara hirarkis atau struktural sedangkan dalam penanggulangan bencana terdapat jejaring yang lebih luas dimana jejaring yang terjadi berbeda jika dibandingkan dengan hirarki. Jaringan secara hirarki atau struktural dalam rehabilitasi dan rekonstruksi ini juga penting untuk dilaksanakan sebagai bagian dari negara hukum yang diatur oleh undang undang dalam sistem administrasi negara. Takeda dan Helms dalam Kusumasari (2014) menyatakan bahwa unsur unsur penting dalam sistem manajemen birokrasi adalah fokus pada aturan dan pelaksanaannya secara formal, yang keduanya lebih menekankan pada proses daripada hasil.

Dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Tsunami di Kabupaten Pandeglang terdapat banyak pihak yang terlibat. Meningkatkan level jejaring antar tingkatan organisasi dan pemerintah merupakan hal yang sangat penting untuk mengoptimalkan aliran sumber daya diantara lembaga lembaga serta meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas kebijakan manajemen bencana (Rey, 1999 dalam Kusumasari, 2014).

Dalam rehabilitasi dan rekonstruksi jangka pendek yang hasilnya harus terlihat dengan segera diprioritaskan oleh kepentingan politik nasional dan lokal. Tantangan yang dihadapi adalah menggabungkan kegiatan jangka pendek dengan inisiatif strategis jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana di masa depan. Pemangku kepentingan pada kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

sering melakukan intervensi secara terisolasi, terputus dari inisiatif pembangunan dan tanpa koordinasi antar lembaga. Penting untuk mengoordinasikan aktor yang berbeda untuk intervensi bersama dengan cara yang terintegrasi dengan arah pembangunan daerah (UNDP, 2016).

Dalam pemerintahan yang terdesentralisasi, penting untuk memperkuat kapasitas lokal sebagai tujuan utama pemulihan karena pemerintah daerah adalah lembaga yang akan mempertahankan pembangunan begitu pendukung eksternal pergi. Berdasarkan hal tersebut penting untuk mempercayai para pemimpin lokal untuk mengidentifikasi kebutuhan kapasitas mereka sendiri. Perencanaan dan implementasi pemulihan harus menjadi bagian dari perencanaan dan implementasi pembangunan. Dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Tsunami di Kabupaten Pandeglang sebagai koordinator dalam pelaksanaan adalah BPBD Kabupaten Pandeglang yang dibantu oleh SKPD di pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang. Jaringan koordinasi pada kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Pandeglang juga mengoordinasikan kapasitas lembaga di pemerintah daerah untuk membagi sektor dan sub sektor dalam kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini juga ditujukan agar arah dalam rekonstruksi pasca bencana Tsunami dapat dikoordinasikan sehingga sejalan dengan arah pembangunan daerah sesuai dengan sektor masing masing.

KESIMPULAN

Berdasarkan Perka BNPB No 11 Tahun 2008 BAB 3 disebutkan bahwa Koordinasi dalam proses rekonstruksi pasca bencana mencakup koordinasi vertikal antara struktur di tingkat daerah dan tingkat pusat. Terdapat dua jaringan koordinasi pada rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Tsunami di Kabupaten Pandeglang yaitu jaringan secara birokrasi dan jaringan koordinasi keseluruhan. Jaringan koordinasi secara hirarkis atau struktural pemerintah pusat sebagai puncak dalam birokrasi merupakan tipe jaringan lead agency. Jaringan koordinasi untuk keseluruhan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Tsunami di Kabupaten Pandeglang dengan BPBD Kabupaten Pandeglang dan Bupati Pandeglang sebagai koordinator utama adalah bentuk jaringan lead leadership. Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kabupaten Pandeglang dapat berjalan dengan baik akibat adanya koordinasi antar instansi dan mencegah adanya duplikasi kegiatan. Dalam jaringan koordinasi yang dilakukan masih adanya beberapa kendala yaitu adanya LSM yang melakukan kegiatan tanpa melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten Pandeglang.

DAFTAR REFERENSI

- Bisri, M. B. (2013). Examining inter-organizational network during emergency response of West Java earthquake 2009, Indonesia. *Procedia Environmental Sciences*, 17, 889-898.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2018. "Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI)" dalam <<http://dibi.bnpb.go.id/dibi/>>. Diakses pada 20 Agustus 2019.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2019. "Potensi Ancaman Bencana" dalam <<http://www.bnpb.go.id/page/read/6/potensi-ancaman-bencana>>. Diakses pada 20 Agustus 2019.
- David Tappin. 2018. "Large Volume Eruption Tsunamis Krakatau 1883" dalam <http://geotek.lipi.go.id/?p=9807>. Diakses pada 20 Agustus 2019.
- Edyanto, C. B. H. (2014). Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Untuk Mengurangi Risiko Bencana Tsunami Di Daerah Pantai. 16(3), 26-32
- Hossain, M. A. (2012). Community participation in disaster management: role of social work to enhance participation. *Sociology*, 159, 171.
- International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRCRCS). 2000. Improving Coordination. Disaster Preparedness Training Programme.
- Khifni Soleman, M., Nurcahyani, F., & Munajati, S. L. (2012). Pemetaan multirawan bencana di provinsi banten. 14(1), 46-59.
- Kusumasari, B. (2014). Manajemen bencana dan kapabilitas pemerintah lokal. Yogyakarta; Gava Media.
- Kusumasari, B. (2014). Memahami Bencana dari perspektif Manajemen dan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
- López-Carresi, A., Fordham, M., Wisner, B., Kelman, I., & Gaillard, J. (Eds.). (2013). Disaster management: International lessons in risk reduction, response and recovery. Routledge.
- Resosudarmo, B. P. (2017). Reconstruction and Rehabilitation After Large-Scale Natural Disasters: Lessons from the Indian Ocean Tsunami in Aceh and Nias, Indonesia. 313-334. https://doi.org/10.1007/978-981-10-6493-7_12
- Setyonugroho, G. A. (2019). Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Yogyakarta 2006 Di Dusun Ngibikan, Bantul. *Jurnal Arsitektur KOMPOSISI*, 10(3), 183. <https://doi.org/10.24002/jars.v10i3.1113>
- United Nations Disaster Assessment and Coordination (UNDAC). 2013. Field Handbook. Edisi ke-6. Kantor Koordinasi dan Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Utami, W., Wibowo, Y. A., & Afiq, M. (2019). Analisis Spasial untuk Lokasi Relokasi Masyarakat Terdampak Tsunami Selat Banten Tahun 2018. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 5(1), 112. <https://doi.org/10.31292/jb.v5i1.323>
- UN-ISDR (2009). Terminologi Pengurangan Risiko Bencana. Asian Disaster Reduction and Response Network (ADRRN)
- UNDP, & UN-ISDR. (n.d.). Guidance Note on Recovery Governance. Earthquake.
- Puspito, Nanang T. Kontribusi Seismologi Pada Riset Dan Mitigasi Bencana Gempa Dan Tsunami. Pidato Ilmiah Guru Besar ITB, 2010.